

Dr. Dwi Sulisworo  
Suranto

# KONSEP PENGEMBANGAN KURIKULUM MEMBANGUN SEKOLAH GLOBAL




 PENERBIT  
PT. SINDUA PRESS

• Dr. Dwi Sulisworo • Suranto

# **Konsep Pengembangan Kurikulum Membangun Sekolah Global**



 PENERBIT  
PT. SINDUA PRESS

## **Konsep Pengembangan Kurikulum Membangun Sekolah Global**

**Penulis:** • Dr. Dwi Sulisworo  
• Suranto

**Editor:** Susilo

**Desain Sampul:** Sucipto

**Ilustrator :** Fajar

**Lay Out:** Pendency

**Penerbit:**

Sidur Press

Jl. Pleburan VIII/64, Semarang

Telp. (024) 6580335, 6582901

Fax. (024) 6582903, 6581440

ISBN: 978 - 979 - 067 - 033 - 4

**Hak Cipta Dilindungi Undang-undang**



# Kata Pengantar



Segala puji kami panjatkan kehadirat Allah swt. yang telah melimpahkan hidayah dan rahmatnya. Dengan rida-Nya telah menaburkan bunga ma'rifat pada hamba-hamba-Nya yang mendambakan kesejukan batin. Serta melimpahkan cahaya bintang yang dapat menerangi bumi nan gulita yang tidak pernah putus. Salawat dan salam kita haturkan kepangkuan Nabi Muhammad saw., selaku insan dan hamba Allah yang terkasih.

Buku **Konsep Pengembangan Kurikulum Membangun Sekolah Global** disusun untuk menambah wacana ataupun referensi yang dapat menjadi masukan, bahan diskusi bagi guru pendidik dan bagi mahasiswa tenaga kependidikan baik strata 1, strata 2 dan strata 3.

Perlu di ketahui bersama bahwa pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap insan. Maka dari itu setiap bangsa akan meningkatkan mutu pendidikan agar dapat memiliki daya saingnya. Banyak persoalan yang dihadapi bangsa terkait dengan program-program dan strategi pembelajaran dalam rangka peningkatan mutu, pendidikan terlebih pada bangsa Indonesia. Dengan terbitnya buku ini semoga dapat menjadi masukan bagi kita semua untuk dapat menciptakan program dan strategi pembelajaran yang lebih baik.

Akhirnya penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak, yang telah membantu dalam penyusunan buku ini. Penyusun berharap semoga buku ini dapat menjadi bahan bacaan bagi siapa saja yang peduli dengan permasalahan pendidikan. Tiada gading yang tak retak, demikian juga dengan tulisan ini. Terima kasih.

Penyusun



# Daftar Isi



**Kata Pengantar** \_\_\_ iii

**Daftar Isi** \_\_\_ iv

**Bab 1 Permasalahan Pendidikan** \_\_\_ 1

- A. Titik Pandang Pendidikan Indonesia \_\_\_ 1
- B. Model Wawasan Pendidikan untuk Indonesia \_\_\_ 10
- C. Prinsip Perubahan Pendidikan Nasional \_\_\_ 15

**Bab 2 Pengembangan Kurikulum** \_\_\_ 21

- A. Pengertian Kurikulum \_\_\_ 21
- B. Prinsip-Pinsip Pengembangan Kurikulum \_\_\_ 27
- C. Model Pengembangan Kurikulum \_\_\_ 37
- D. Desentralisasi dan Rencana Strategi Merajut Kurikulum Lokal \_\_\_ 40

**Bab 3 Perjalanan Kurikulum** \_\_\_ 50

- A. Kurikulum Nasional \_\_\_ 50
- B. Merancang Kurikulum Lokal \_\_\_ 56
- C. Merancang Kurikulum Lokal Berstandar Nasional \_\_\_ 61

**Daftar Pustaka** \_\_\_ 68



---

# Bab 1

## Permasalahan Pendidikan

### A. Titik Pandang Pendidikan Indonesia

Dapat dilihat dan dikaji bahwa dari segi geografis, etnis, sosial, historis, temuan sistem, serta kajian filsafat, penekanan metodologi antara berbagai bangsa di dunia adalah berbeda. Perbedaan itu menjadi peluang untuk muncul sebagai bangsa maju yang bersifat unik. Keberanian untuk melakukan pemilihan garis sejarah akan menjadi penentu dalam berdiri dan berkembangnya suatu bangsa.

Selama ini bangsa Indonesia dalam setiap kebijakan yang terkait dengan dunia luar memiliki kecenderungan untuk mengembangkan pola kebijakan yang reaktif. Hal ini juga terjadi pada

kebijakan pendidikan yang berlaku dan terjadi selama ini. Pola kebijakan yang reaktif senantiasa mengedepankan apa yang dikenal dengan akulturasi dan adaptasi. Pola ini melihat adanya pengaruh dari luar sebagai aksi dan perlu diberikan reaksi. Adanya fakta, konsep, dan prinsip yang muncul dari pengetahuan lokal relatif menjadi tidak diperhatikan dengan baik. Sebagai contoh saat ini, begitu muncul isu tentang globalisasi, pasar bebas, dunia tanpa batas, maka reaksi yang dikembangkan adalah membuat perencanaan pendidikan yang dapat berorientasi pada isu-isu tersebut. Sebagai akibatnya, dengan pola yang seperti itu, maka hingga detik ini tak satu pun hasil dari pendidikan Indonesia yang dapat dibanggakan dalam kancah internasional. Indonesia senantiasa menjadi pengikut dari negara yang maju. Hal ini akan berlangsung selamanya.

Dengan strategi yang dikembangkan oleh negara-negara maju pada perpendekan umur hidup (*life cycle*) suatu produk (termasuk juga pendidikan di dalamnya). Maka isu-isu baru dari

negara maju akan segera bermunculan menggantikan isu-isu yang ada sekarang ini dengan kecepatan dan percepatan yang lebih tinggi. Apabila Indonesia tetap memegang strategi yang reaktif maka posisi/ situasi sebagai negara sedang berkembang tidak akan pernah bergeser.

Salah satu alternatif untuk dapat memosisikan diri setara dengan negara lain adalah dengan mengembangkan pola berpikir yang proaktif. Berbeda dengan pola berfikir yang reaktif, pola ini memiliki peluang adanya proses pemilihan untuk memberikan reaksi yang akan dimunculkan yang berdasarkan pada kemandirian yang dimiliki. Dapat dikatakan bahwa di antara aksi dan reaksi ada proses memilih reaksi untuk ditampilkan. Sehingga untuk aksi yang sama akan muncul reaksi yang berbeda yang sangat tergantung pada kemampuan memilih. Dengan adanya instabilitas pemikiran (krisis pemikiran) yang terjadi di negara maju dalam paradigma objektif-empiris yang berkembang dan menguasai saat ini,



terbuka peluang bagi Indonesia untuk menampilkan cara berfikir yang berbeda dan telah dimiliki. Bila diperhatikan dengan seksama, sesungguhnya pemikiran analitis-empiris yang dikaitkan dengan 6 materi ilmu, maka sesungguhnya ada kesenjangan atau kekurangan dalam bagaimana ilmu perlu dikembangkan. Juga dikaitkan dengan posisi manusia yang keberadaannya tidak sebatas pada materi belaka, maka sejak awal telah dapat diduga bahwa pemikiran empiris objektif akan menjadikan ketidakseimbangan alam (dalam pemikiran tentunya).

Bila negara Barat (maju) selama ini mengembangkan pemikiran yang objektif dan rasional, hal yang berbeda dengan negara Timur (Indonesia di dalamnya). Selama ini bangsa-bangsa Timur lebih mengedepankan pemikiran yang subjektif-instingtif. Atau kalau boleh dianalogikan dengan belahan otak, maka Barat mewakili perkembangan otak kiri dan Timur mewakili perkembangan otak kanan. Keberuntungan negara Barat saat ini berhasil

untuk membangun dunia dengan cara seperti itu. Sementara itu Timur yang kuat pada otak kanan, berusaha secara reaktif meniru Barat dengan berbasis pada otak kanan. Maka dari itu hasil yang didapat kurang begitu memuaskan. Oleh sebab itu, peluang yang ada perlu disambut dengan semangat mengembangkan cara berpikir yang khas, mandiri dan berbeda dengan yang dikembangkan oleh Barat.

Hal lain yang dapat dilihat adalah pencampuradukan antara prinsip dengan praktik. Prinsip adalah sesuatu yang memiliki kebenaran secara universal. Sedangkan praktik adalah sesuatu yang bersifat kontekstual, dapat berbeda tergantung pada ruang dan waktu. Isu globalisasi selama ini dilihat sebagai sesuatu yang bersifat universal. Oleh sebab itu, apa yang diatasnamakan sebagai globalisasi akan segera ditangkap oleh setiap bangsa sebagai kemajuan. Padahal globalisasi hanyalah sebuah praktik lokal yang karena kemampuan untuk menjual atau karena kemenangan budaya (maupun kekuasaan) didesakkan (neo



imperialisme, neo kolonialisme) kepada bangsa lain sehingga menjadi fenomena yang terjadi di banyak negara. Perlu ditegaskan bahwa globalisasi sangatlah berbeda dengan universalisasi. Universalisasi berlandaskan pada prinsip sedangkan globalisasi berlandaskan pada praktek. Menggabungkan kelatihan globalisasi dengan pola reaktif, maka yang muncul adalah tambah kentalnya keterpurukan pendidikan di Indonesia.

Memperhatikan tahapan-tahapan kemajuan suatu bangsa dapat dipilah menjadi tiga tahap. Tahap pertama adalah ketergantungan. Tahap kedua adalah kemandirian. Dan tahap ketiga adalah saling ketergantungan. Pada tahap pertama, suatu bangsa relatif tidak dapat memenuhi hajatnya tanpa bantuan atau uluran tangan dari negara lain. Setiap aktivitas tidak dapat berkembang dengan baik. Pemikiran-pemikiran yang berkembang sangat dipengaruhi dan tumbuh sesuai dengan keadaan atau situasi negara lain yang dianggap lebih hebat. Meski memiliki kesadaran akan jati dirinya, namun

tidak dapat berkulit karena belitan pengaruh negara lain baik secara sosial, ekonomi, budaya maupun politik.

Pada tahap kedua, suatu bangsa telah memiliki kesadaran (sebagai gabungan dari pengetahuan, keinginan dan ketrampilan) untuk secara berbeda dan berjuang menampilkan apa yang dimiliki tanpa takut untuk ditekan dari luar. Pada tahap ini sesungguhnya merupakan tahap yang paling berat. Tekanan dari negara yang lebih maju senantiasa akan terjadi untuk dapat mengkooptasi pemikiran negara dengan simbol-simbol ekonomi, politik maupun budaya. Aktivitas pemikiran yang muncul merupakan aktivitas yang berakar dari kesadaran diri sebagai bangsa yang berbeda dengan bangsa lain. Sifat unik menjadi ciri utama untuk dapat berkembang. Pengetahuan lokal ditumbuhkan sebagai satu cara untuk membangun pilar-pilar bangsa. Kalau toh terjadi proses akulturasi, maka nilai-nilai yang diambil adalah nilai yang bersifat universal dan diadaptasi untuk menjadi praktik lokal,

bukan sebagai suatu yang disebut akibat atau tuntutan globalisasi.



Pelajar Indonesia mampu berkomunikasi dengan orang asing.

Pada tahap ketiga adalah saling ketergantungan. Sebagai salah satu bangsa yang ada di dunia ini, maka pasti akan terjadi saling

pengaruh mempengaruhi dengan bangsa yang lain. Kesetaraan posisi menjadi kata kunci. Sehingga tekanan yang berbahasa kekuasaan dari negara lain tidak akan pernah terjadi. Dari sini dapat dikatakan bahwa suatu bangsa memiliki saling ketergantungan, namun bagaimana mungkin akan muncul kesadaran tersebut bila sebelumnya tidak ada kemandirian. Tanpa kemandirian yang muncul dari proses saling mempengaruhi adalah hanya satu bangsa tergantung pada bangsa yang lain. Indonesia saat ini pada posisi sebagai negara yang tergantung pada negara lain hampir di segala aspek.

”Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridpan Kami, kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang berbuat baik.” (Q.S. al-Ankabūt/29 ayat 69).

## B. Model Wawasan Pendidikan untuk Indonesia

Membangun sektor pendidikan tidak pernah akan mencapai tujuan akhir yang sempurna dan final. Hal ini terjadi karena konteks pendidikan selalu dinamik, berubah, dan tidak pernah konstan, sesuai dengan perubahan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi. Terlebih-lebih dalam era informasi seperti saat ini, keterbukaan di hampir semua aspek dan sistem kehidupan manusia tidak dapat dicegah lagi oleh kekuatan apapun. Hal ini membawa dampak pada cepat usangnya kebijakan maupun praksis pendidikan.

Begitu pula parameter kualitas pendidikan, baik dilihat dari segi *input*, *process*, *product*, maupun *outcome* selalu berubah dari waktu ke waktu. Oleh sebab itu, pendidikan nasional secara terus-menerus perlu ditingkatkan kualitasnya, melalui sebuah pembaruan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada para *stakeholders*. Hal ini agar dari sektor pendidikan mampu mempersiapkan generasi penerus yang

memiliki keunggulan kompetitif dalam menjawab dan memecahkan tantangan masa depan bangsa. Keberhasilan bangsa ini menghadapi tantangan masa depan abad ke-21, sangat tergantung pada keberhasilan memperbaiki dan memperbarui pembangunan sektor pendidikan saat ini.

Seiring dengan semangat reformasi nasional dalam bidang politik, ekonomi, dan hukum; otonomi daerah telah menjadi ketetapan dan kesepakatan nasional untuk dilaksanakan mulai bulan Januari 2001, dengan diberlakukan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 (Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah), Undang-Undang No.25 Tahun 1999 (Undang-undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah). Undang-undang tersebut juga dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2000 (Peraturan tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom). Pelaksanaan Undang-Undang tersebut membawa



implikasi pada berubahnya *setting* pendidikan baik di tingkat pusat maupun daerah.

Sebelum era otonomi daerah, pendidikan menampilkan sosoknya dalam model yang sentralistik. Dalam sistem sentralistik yang telah diterapkan selama hampir setengah abad sejak Negara Republik Indonesia berhasil memperjuangkan kemerdekaannya, pemerintah pusat memiliki peran yang amat penting dalam perencanaan, implementasi, dan pengawasan kebijakan pendidikan. Untuk saat ini model seperti itu sudah tidak relevan lagi. Begitu pula Undang-Undang Pendidikan Nasional (UU No.2 Tahun 1989), juga sudah tidak relevan lagi dengan semangat otonomi, meskipun dalam undang-undang itu sudah mengawali gagasan otonomi dalam *scope* yang amat terbatas, yaitu adanya muatan kurikulum lokal.

Oleh sebab itu sudah merupakan kebutuhan yang amat mendesak untuk melakukan reformasi pendidikan agar pendidikan nasional Indonesia mampu menemukan relevansinya dengan sistem pemerintahan yang mendasarkan diri pada sistem

desentralisasi. Hal ini perlu dilakukan mengingat sektor pendidikan juga merupakan salah satu bidang yang harus didesentralisasikan. Dengan demikian otonomi pendidikan merupakan suatu agenda penting yang menjadi jiwa dan spirit dari reformasi pendidikan nasional. Dalam era otonomi daerah seperti saat ini, reformasi pendidikan perlu segera dilakukan agar masyarakat secara luas, keluarga, sektor swasta, politisi, dan juga unit-unit pemerintahan di semua tingkatan, akhirnya mampu memahami bahwa pendidikan merupakan *human investment* penting yang dirancang dan dibiayai secara lebih memadai agar bangsa ini mampu tumbuh dan bersaing dengan bangsa lain seiring dengan pertumbuhan dan proses demokratisasi dalam berbagai sistem kehidupan di Indonesia.

Manakala reformasi pendidikan tidak segera dilakukan ada peluang yang cukup besar, dalam jangka panjang, terjadinya *mismatch* antara sistem pemerintahan dan sistem pendidikan nasional. Kalau hal ini terjadi tidak menutup kemungkinan akan terjadi kekacauan

dalam sistem pendidikan nasional. Dampak sertaan dari keadaan yang demikian, dapat dipastikan bahwa bangsa ini akan kehilangan kesempatan untuk belajar dan berperikehidupan secara demokratis, egaliter, bermartabat, dan berharkat di tengah-tengah masyarakat madani yang dicita-citakan sejak lahirnya era reformasi.

Globalisasi, meskipun kadang-kadang telah dijadikan klise dalam suatu wacana, dampak dan pengaruhnya di bidang pendidikan tidak dapat dibendung oleh siapapun. Globalisasi melahirkan ukuran-ukuran baru, cara-cara baru, dan juga paradigma baru dalam memandang kualitas hasil (*outcome*) pendidikan. Resep keberhasilan lama tidak akan dapat diulang lagi untuk meraih keberhasilan yang sama di era global seperti saat ini. Kualitas *outcome* pendidikan perlu mengacu pada ukuran-ukuran yang bersifat internasional. Oleh karena itu ketentuan tentang penjaminan mutu layanan pendidikan (*quality assurance*) perlu ditegakkan dalam semua aspek yang mendukung proses pendidikan dalam arti yang luas agar pendidikan

nasional mampu mempertahankan relevansinya terhadap tuntutan kualitas yang bersifat global sebagai akuntabilitas publik.

Dalam konteks globalisasi, daerah-daerah juga perlu menetapkan target (*benchmarking*) di sektor pendidikan yang dikelolanya secara otonomi dalam aspek *input*, *process*, *product*, maupun *outcome* agar otonomi daerah tidak membuat sektor pendidikan justru menjadi ketinggalan zaman.

*"Sesungguhnya Allah baik dan menyukai kebaikan, bersih dan menyukai kebersihan, murah hati dan senang kepada kemurahan hati, dermawan dan senang kepada kedermawanan."* (HR. Tirmizi)

### C. Prinsip Perubahan Pendidikan Nasional

Dalam mewujudkan tujuan dari pendidikan nasional agar sesuai dengan harapan, maka

diperlukan adanya suatu perubahan. Dalam perubahan itu ada prinsip yang dapat dikembangkan di antaranya berikut.

1. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis, bukan secara diskriminatif, berlandaskan hak-hak asasi manusia dan nilai-nilai keagamaan, kultural, dan pluralitas bangsa.
2. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
3. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multi makna berdasarkan legalitas.
4. Pendidikan diselenggarakan berdasarkan prinsip *ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani*, baik dalam proses belajar mengajar maupun dalam pengelolaannya.
5. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen

masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di dalam negeri dan isu-isu mutakhir dari luar negeri yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia merupakan hal-hal yang harus segera ditanggapi dan dipertimbangkan dalam penyusunan kurikulum baru pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Pertama, dengan diluncurkannya beberapa peraturan perundang-undangan yang baru telah membawa implikasi terhadap paradigma pengembangan kurikulum pendidikan dasar dan menengah antara lain pembaharuan dan diversifikasi kurikulum, serta pembagian kewenangan pengembangan kurikulum.

Kedua, dengan perkembangan dan perubahan global dalam berbagai aspek kehidupan yang datang begitu cepat telah menjadi tantangan nasional dan menuntut

perhatian segera dan serius dengan memperhatikan peran pengembangan menjadi bangsa yang mandiri.

Ketiga, dengan kondisi masa sekarang dan kecenderungan di masa yang akan datang perlu dipersiapkan generasi muda termasuk peserta didik yang memiliki kompetensi yang multidimensional.

Keempat, dengan mengacu pada ketiga hal tersebut maka pengembangan kurikulum masa sekarang hendaknya dapat mengantisipasi secara proaktif persoalan-persoalan yang mempunyai kemungkinan besar sudah atau akan terjadi.

Kurikulum yang dibutuhkan di masa yang akan datang yaitu kurikulum yang berbasis kompetensi. Kompetensi dikembangkan untuk memberikan keterampilan dan keahlian bertahan hidup dalam perubahan, pertentangan, ketidaktentuan, ketidakpastian, dan kerumitan-kerumitan dalam kehidupan. Kurikulum berbasis kompetensi ditujukan untuk menciptakan tamatan yang kompeten dan

cerdas dalam membangun identitas budaya dan bangsanya. Kurikulum ini dapat memberikan dasar-dasar pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman belajar yang membangun integritas sosial, serta membudayakan dan mewujudkan karakter nasional.

Dengan kurikulum yang demikian dapat memudahkan guru dalam penyajian pengalaman belajar yang sejalan dengan prinsip belajar sepanjang hayat yang mengacu pada empat pilar pendidikan universal, yaitu: belajar mengetahui, belajar melakukan, belajar menjadi diri sendiri, dan belajar dalam kebersamaan.

Mempersiapkan peserta didik yang memiliki berbagai kompetensi pada hakikatnya merupakan upaya untuk menyiapkan peserta didik yang memiliki kemampuan intelektual, emosional, spiritual, dan sosial yang bermutu tinggi. Dengan memiliki kompetensi semacam itu, peserta didik diharapkan mampu untuk menghadapi dan mengatasi segala macam akibat dari adanya perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam lingkungan yang



terdekat sampai yang terjauh (lokal, nasional, regional, dan internasional).

Di negara yang sudah maju dan mapan dalam bidang pendidikan, perubahan kurikulum merupakan sesuatu hal yang dapat terjadi kapan saja sesuai dengan kebutuhan. Namun, di negara yang sedang berkembang, perubahan kurikulum seringkali ditanggapi sebagai sesuatu hal yang luar biasa, bahkan sering berlebihan, yang kadangkala sampai meresahkan masyarakat.

Seiring dengan terjadinya perubahan dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, serta perkembangan dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni jelas membawa implikasi terhadap perlunya perubahan kurikulum. Hasil dari analisis yang mendalam terhadap keadaan dan kebutuhan bagi peserta didik di masa yang akan datang diperlukan adanya kurikulum berbasis kompetensi. Oleh karena itu, kurikulum berbasis kompetensi perlu disusun untuk membekali peserta didik dalam menghadapi tantangan hidupnya di kemudian hari secara mandiri, cerdas, kritis, rasional, dan kreatif.

---

## Bab 2

# Pengembangan Kurikulum

### A. Pengertian Kurikulum

Kata “kurikulum” bukan berasal dari bahasa Indonesia, tetapi berasal dari bahasa latin yang kata dasarnya adalah “*currere*”. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (Alip, 2005). Ada harapan dewasa ini bahwa kurikulum yang di buat memiliki tingkat daya saing, pengetahuan yang mendasar dan luas (*broad based education*). Jika kita merancang kurikulum kita fokuskan materi dasar

tiap sekolah, agar sekolah memiliki muatan lokal yang menjadi ciri khusus sekolah tersebut, dengan konsep *focused based* yang artinya mendasar dan fokus sesuai kebutuhan pasar.

Lembaga pendidikan kedepannya dituntut untuk tetap eksis, mendapat *image* positif dan mempunyai kans yang cukup besar jika lulusannya banyak terserap di pasar kerja. Langkah proaktif sebagai aktivitas dini dalam menyikapi perubahan yang cukup mendasar tersebut, merupakan tindakan antisipasi, reaksi responsif dan sensitif dari konsekuensi evolusi proses kemajuan pendidikan. Oleh karena itu, strategi yang direncanakan ini akan menjadi jalan perintis dalam mencapai tujuan, bukan *by accident* tetapi *by plan*.

*By plan* yang matang diiringi perencanaan, pengendalian, desain dan manajemen yang baik maka lembaga pendidikan akan menghasilkan lulusan yang kompetitif dan relevan di pasar kerja. Lulusan berdaya saing masih sangat dibutuhkan di pasar kerja asalkan manajemen sekolah mau berubah, merancang kurikulum

muatan lokal dan menggali potensi daerah guna menciptakan keunggulan dan memadukan kurikulum nasional dengan menyiapkan material, proses, dan keluaran yang terbaik. Tetapi peranan utamanya adalah proses (pembelajaran dan strateginya dalam mewujudkan kurikulum yang direncanakan).

Tulisan ini memberikan usulan, masukan, wacana pemikiran diskusi tentang kurikulum yang sesuai dengan peluang pasar. Agar lulusan yang dihasilkan menjadi tenaga siap kerja, berakses pada pendeknya waktu kuliah dan lulusan laku di pasar kerja.

Perbaikan kualitas lulusan bisa ditempuh dengan penerapan paradigma baru pendidikan yang dicanangkan beberapa perguruan tinggi, misalnya strategi yang telah diuji dari Dirjenti Dikti (L-RAISE). Ada juga perguruan tinggi yang menerapkan strategi SALA dengan akronim **S** (*Student attractiveness*), **A** (*Academic atmosphere*), **L** (*Labor market*), **A** (*Accountability*) (Siswanto, 2002).

*Student attractiveness* artinya menjadikan lembaga pendidikan sebagai pilihan pertama bagi calon mahasiswa. *Academic atmosphere* artinya penciptaan lingkungan pendidikan pembelajaran terjadi suasana akademis yang baik dalam rangka penciptaan *character building*, menghasilkan lulusan yang mempunyai nilai jual tinggi. *Labor market* artinya tidak ada kata menganggur atau berhenti dalam menciptakan lulusan siap di pasar kerja. *Accountability* artinya lulusan yang dihasilkan siap terlalu dapat dipertanggungjawabkan bagi dunia.

Banyaknya pengangguran, rendahnya lulusan yang terserap di dunia kerja dan lamanya waktu studi adalah *point* yang digagas dalam tulisan ini. Sehingga pembahasan ini terfokus pada strategi pembelajaran dalam rangka menyiapkan lulusan tersebut sehingga mampu menekan angka pengangguran dan mengurangi waktu lamanya studi siswa.

Dengan demikian kurikulum berfungsi sebagai patokan atau standar kompetensi maupun tujuan yang ingin dicapai. Adapun pihak

yang terkait dalam kurikulum sekolah secara langsung ialah guru, kepala sekolah, para penulis buku ajar, dan masyarakat. Berikut ini akan dijelaskan seberapa jauh keterlibatan mereka dalam melaksanakan kurikulum.

Buku yang ditulis atau materi yang di ajarkan, tentunya harus mempelajari terlebih dahulu kurikulum (KTSP) yang berlaku pada waktu itu. Untuk membuat berbagai pokok bahasan maupun sub pokok bahasan, hendaknya penulis buku ajar membuat analisis instruksional. Setelah itu, menyusun Program Pelajaran untuk mata pelajaran tertentu dari berbagai sumber bahan yang relevan. Sumber bahan tersebut dapat berupa bahan cetak: buku, makalah, majalah, jurnal, koran, hasil penelitian dan sebagainya, yang diambil dari para nara sumber, pengalaman penulis sendiri atau dari lingkungan. Materi yang ditulis harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut (Depdiknas, 2003).

- a. Materi yang disajikan hendaknya bersifat pedagogis, artinya bahan hendaknya berisikan hal-hal yang normatif.

- b. Materi yang disajikan hendaknya bersifat psikologis, artinya bahan yang ditulis memperhatikan kejiwaan peserta didik yang mempergunakannya.
- c. Materi yang disajikan hendaknya disusun secara didaktis, artinya bahan yang tertulis tersebut dapat diorganisir sedemikian rupa sehingga mudah untuk diajarkan.
- d. Materi yang disajikan hendaknya bersifat sosiologis, artinya bahan jangan sampai kontroversial dengan keadaan masyarakat sekitar.
- e. Materi yang disajikan hendaknya bersifat yuridis, artinya bahan yang disusun jangan sampai bertentangan dengan peraturan pendidikan nasional yang berlaku.

*Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. (QS. al-Mujādilah/58:11)*

## B. Prinsip-Prinsip Pengembangan Kurikulum

Dengan memperhatikan beberapa pertimbangan perlunya perubahan kurikulum sebagai antisipasi proaktif perubahan, maka dapat dikembangkan beberapa prinsip yang mungkin dalam pengembangan kurikulum prinsip itu antara lain.

1. Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan secara *berdiversifikasi* sesuai dengan ciri khas satuan pendidikan pada masing-masing jenjang pendidikan dengan memperhatikan potensi dan minat peserta didik, keanekaragaman potensi daerah dan lingkungan, tuntutan pembangunan daerah dan nasional, tuntutan dunia kerja, kebutuhan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta tuntutan budaya setempat.
2. Kurikulum mencakup aspek moral keagamaan dan etika, pembentukan karakter, kecerdasan, seni, keterampilan belajar, keterampilan hidup yang bermartabat, pola hidup sehat, kebugaran jasmani, estetika,



dan rasa kebangsaan, sehingga tidak muncul lagi dualisme dalam sistem pendidikan.

3. Kurikulum sekolah dikembangkan berdasarkan kerangka dasar kurikulum oleh setiap atau kelompok satuan pendidikan dan Komite Sekolah yang bekerja secara mandiri meski tetap terjadi saling kooperasi dan kolaborasi dengan institusi dan lembaga lain.
4. Keseimbangan etika, logika, estetika, dan kinestika. Kurikulum merupakan input instrumental yang digunakan untuk menyeimbangkan pengalaman belajar yang mengembangkan etika, estetika, logika, dan kinestika. Pengembangan etika dilaksanakan dalam rangka penanaman nilai-nilai sosial dan moral termasuk menghargai dan mengangkat nilai-nilai pluralitas dan nilai-nilai universal. Pengembangan estetika menempatkan pengalaman belajar dalam konteks holistik dan total untuk memberikan ruang bagi

pengalaman estetik dengan melalui berbagai kegiatan yang dapat mengekspresikan gagasan, rasa, dan karsa. Logika yang dikembangkan termasuk berpikir kreatif dan inovatif dengan keseimbangan yang nyata antara kognisi dan emosi dapat memberikan keterampilan kognitif sekaligus dengan keterampilan interpersonal.

5. Kesamaan memperoleh kesempatan. Setiap orang berhak menerima pendidikan yang tepat sesuai dengan kemampuan dan kecepatannya. Untuk itu perlu adanya jaminan keberpihakan kepada peserta didik yang kurang beruntung dari segi ekonomi dan sosial, yang memerlukan bantuan khusus, berbakat, dan unggul. Hal tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk menjamin persamaan memperoleh kesempatan pendidikan.
6. Memperkuat identitas nasional. Kurikulum hendaknya menanamkan dan mempertahankan kebanggaan menjadi bangsa Indonesia melalui pemahaman terhadap

pertumbuhan peradaban bangsa Indonesia dan sumbangan bangsa Indonesia terhadap peradaban dunia. Dengan demikian kurikulum perlu mempertahankan keberlanjutan tradisi budaya yang bermanfaat dan mengembangkan kesadaran, semangat nasional. Materi tentang pemeliharaan identitas nasional, patriotisme, sikap non-sektarian, kemampuan untuk bertoleransi terhadap perbedaan yang ditimbulkan oleh agama, ideologi, wilayah, bahasa, dan gender perlu diperhatikan dalam kurikulum.

7. Menghadapi abad pengetahuan. Globalisasi dalam bidang informasi, komunikasi, dan teknologi menyebabkan semakin meningkatnya fenomena perkembangan ekonomi berbasis pengetahuan. Pasar bebas, kemampuan bersaing, serta penguasaan pengetahuan dan teknologi menjadi makin penting untuk kemajuan suatu bangsa. Sumber daya alam yang makin terbatas tidak lagi dapat menjadi tumpuan modal karena sumber kesejah-

teraaan suatu bangsa telah bergeser dari modal fisik ke modal intelektual, pengetahuan, sosial, dan kredibilitas. Pada abad pengetahuan ini diperlukan masyarakat yang berpengetahuan yang diperoleh dengan cara belajar sepanjang hayat. Sifat pengetahuan dan keterampilan yang harus dikuasai oleh masyarakat sangat beragam dan berkualitas, sehingga diperlukan kurikulum yang mendorong untuk meningkatkan kemampuan metakognitif dan kemampuan berpikir dan belajar dalam mengakses, memilih, menilai pengetahuan, dan mengatasi situasi yang membingungkan dan penuh ketidakpastian.

8. Menyongsong tantangan teknologi informasi dan komunikasi. Revolusi dalam teknologi informasi dan komunikasi merupakan tantangan fundamental yang dapat mengubah masyarakat biasa ke dalam masyarakat informasi dan masyarakat pengetahuan. Teknologi informasi dan komunikasi berpotensi untuk menyediakan

kemudahan belajar elektronik atau belajar dengan kabel *on-line* yang mempermudah akses ke dalam informasi dan ilmu pengetahuan baru yang tidak tertulis dalam kurikulum. Oleh karena itu diperlukan kurikulum yang luwes dan adaptif terhadap berbagai pengetahuan baru sesuai dengan keadaan zaman.



Pemanfaatan kemajuan dibidang elektronik dalam pembelajaran.

9. Mengembangkan keterampilan hidup. Pendidikan perlu menyiapkan peserta didik

agar mampu dalam mengembangkan keterampilan hidup untuk menghadapi tantangan hidup yang terjadi di masyarakatnya. Beberapa aspek utama keterampilan hidup antara lain kerumahtanggaan, pemecahan masalah, berpikir kritis, komunikasi, kesadaran diri, menghindari stres, membuat keputusan, berpikir kreatif, hubungan interpersonal dan pemahaman tentang berbagai bentuk pekerjaan serta kemampuan vokasional disertai sikap positif terhadap kerja. Oleh karena itu, di dalam kurikulum perlu dimasukkan keterampilan hidup agar peserta didik memiliki kemampuan bersikap dan berperilaku adaptif dalam menghadapi tantangan dan tuntutan kehidupan sehari-hari secara efektif.

10. Pendidikan tidak hanya terjadi secara formal di sekolah tetapi juga memungkinkan untuk terjadi di mana saja. Hal itu sangat penting terutama dalam rangka mencapai universalisasi dan demokratisasi pendi-

dikan. Pendidikan ini meliputi antara lain pendidikan non-formal, pendidikan terbuka, pendidikan jarak jauh, sistem lain yang lentur yang diselenggarakan oleh pemerintah atau organisasi non-pemerintah.

11. Pendidikan pada anak sebagai pembangun pengetahuan. Upaya untuk memandirikan peserta didik untuk belajar, berkolaborasi, membantu teman, mengadakan pengamatan, dan penilaian diri untuk suatu refleksi akan mendorong mereka untuk membangun pengetahuannya sendiri. Dengan demikian pandangan baru akan diperoleh melalui pengalaman langsung secara lebih efektif. Dalam hal ini, peran utama guru adalah sebagai fasilitator belajar.
12. Pendidikan multikultur dan multibahasa. Indonesia terdiri atas masyarakat dengan beragam budaya, bahasa, dan agama. Implikasi dari hal tersebut yaitu bahwa dalam pendidikan perlu menerapkan metodik yang produktif dan kontekstual untuk mengakomodasikan sifat dan sikap

masyarakat pluraristik dalam kerangka pembentukan jati diri bangsa.

13. Penilaian berkelanjutan dan komprehensif. Kurikulum hendaknya mampu menanggapi kebutuhan belajar peserta didik untuk mengetahui hasil belajarnya. Hasil belajar dipandang sebagai umpan balik untuk perbaikan lebih lanjut terhadap segala kekurangan dan kelebihan peserta didik selama belajar dalam kurun waktu tertentu. Oleh karenanya penilaian berkelanjutan dan komprehensif menjadi sangat penting dalam dunia pendidikan. Hasil dari suatu penilaian umumnya tergantung pada identifikasi jenis dan alat penilaian yang digunakan serta tujuan, kriteria penilaian, dan interpretasi hasil. Relevansi, reliabilitas, dan validitas penilaian merupakan prosedur yang menentukan kualitas umpan balik. Penilaian berkelanjutan mengacu kepada penilaian yang dilaksanakan oleh guru itu sendiri dengan proses penilaian yang dilakukan secara transparan. Penilaian harus



dilakukan secara komprehensif yang mencakup aspek kompetensi akademik dan keterampilan hidup.

14. Pendidikan harus berlanjut sepanjang hidup manusia dalam rangka untuk mengembangkan, menambah kesadaran, dan selalu belajar tentang dunia yang berubah dalam segala bidang. Dengan demikian, kerusakan dan keusangan pengetahuan dapat dihindari. Dalam hal ini, kurikulum harus menyediakan kompetensi dan materi yang berguna bagi peserta didik bukan hanya untuk kepentingannya di masa sekarang, tetapi juga kepentingannya di masa yang akan datang dengan memberikan fondasi yang kuat untuk inkuiri dan memecahkan masalah yang merupakan titik awal untuk menguasai cara berpikir bagaimana berpikir dan belajar sepanjang hidupnya.

Imam Syafii ketika masih menuntut ilmu, pernah mengeluh kepada gurunya. *"Wahai, Guru. Mengapa ilmu yang sedang kukaji ini susah sekali memahaminya dan bahkan cepat lupa?"* Sang guru menjawab, *"Ilmu itu ibarat cahaya. Ia hanya dapat menerangi gelas yang bening dan bersih."* Artinya, ilmu itu tidak akan menerangi hati yang keruh dan banyak maksiatnya.

### C. Model Pengembangan Kurikulum

Beberapa hal pokok dalam reformasi pendidikan ini mencakup aspek-aspek: (1) reformasi pembelajaran, (2) peserta didik sebagai pusat pembelajaran, (3) penilaian belajar yang autentik, (4) menekankan pada penguasaan kemampuan dasar, (5) guru sebagai agen reformasi pembelajaran, dan (6) dukungan penyelenggaraan belajar sepanjang hayat.

Reformasi pendidikan menempatkan peserta didik sebagai salah satu komponen utama yang menjadi fokus dalam proses pendidikan. Memberikan keleluasaan gerak kepada peserta didik, agar menjadi individu yang beriman, bertawa, berakhlak mulia, mandiri, kreatif, sehat, berbudaya, beretos kerja, berpengatahuan dan menguasai teknologi, serta cinta tanah air.

Dalam kaitan ini setiap peserta didik pada suatu satuan pendidikan mempunyai hak-hak untuk: (a) mendapatkan perlakuan sesuai dengan kondisi, bakat, minat, dan kemampuannya, (b) mengikuti program pendidikan yang sesuai atas dasar pendidikan berkelanjutan, baik untuk mengembangkan kemampuan diri maupun untuk memperoleh pengakuan tingkat pendidikan tertentu yang telah dibakukan, (c) memperoleh penilaian proses dan hasil pendidikan, dan (d) mendapat pelayanan khusus bagi yang mengalami kelemahan dan kelebihan fisik, mental, emosi, dan sosial. Dengan menempatkan peserta didik pada posisi sentral

itu, maka dasar, fungsi, tujuan, dan prinsip pendidikan nasional mengacu pada akar budaya bangsa, kekinian, dan kemasadepanan bagi peserta didik.

Pendidikan nasional dengan demikian berfungsi untuk mengembangkan seluruh potensi bangsa; kesehatan fisik dan mental; kecerdasan; pengetahuan; moralitas; integritas, sehingga dapat hidup bersama dalam keserasian serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat bangsa dalam rangka mewujudkan tujuan nasional, yaitu suatu masyarakat madani.

Dengan dasar pemikiran sebagaimana teruraikan itu, perlu dibangun sistem pendidikan yang kondusif. Berkenaan dengan kelembagaan pendidikan yang sesuai dengan peserta didik, kurikulum yang berdiversifikasi, adanya standar nasional, tenaga kependidikan yang memadai, pelibatan berbagai sumber daya, pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi tepat guna dan teknologi informasi, pengaturan hak dan tanggung jawab yang berimbang, administrasi dan manajemen pendidikan yang

memfasilitasi pembelajaran peserta didik. Dengan sistem yang demikian, diharapkan pendidikan akan menuju kualitas yang maju berkelanjutan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dengan *output* manusia Indonesia yang berkualitas.

"Sesungguhnya Allah membiarkan sesat siapa yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk siapa yang dikehendaki-Nya." (QS. al-Fathir ayat/35 : 8).

#### **D. Desentralisasi dan Rencana Strategi Merajut Kurikulum Lokal**

Desentralisasi pendidikan merupakan reformasi yang sangat populer di dunia saat ini, namun arti, tujuan, upaya-upaya yang ditempuh, dan hasilnya berbeda-beda sesuai dengan jumlah perbedaan negara yang melakukan desentralisasi itu sendiri. Misalnya USAID

(2000) dalam (Slamet : 1998) mendefinisikan desentralisasi sebagai proses penyerahan kekuasaan kepada pemerintahan daerah di pilih rakyat melalui...” Desentralisasi, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, adalah penyerahan wewenang oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desentralisasi adalah perubahan, baik perubahan lingkungan, kelembagaan, maupun orang (UNDP, 2002) dalam Slamet (1998). Desentralisasi adalah perubahan tentang *rules, roles, relationships, and regularities/routines*. Desentralisasi memerlukan *new habits of mind and heart (US Department of Education, 190)*. Slamet PH (1998) menegaskan bahwa desentralisasi pendidikan memerlukan sistem/struktur, kultur, dan figur (pelaku). Hal ini berbeda dengan sentralisasi sehingga perlu dilakukan resistemisasi/restrukturisasi,

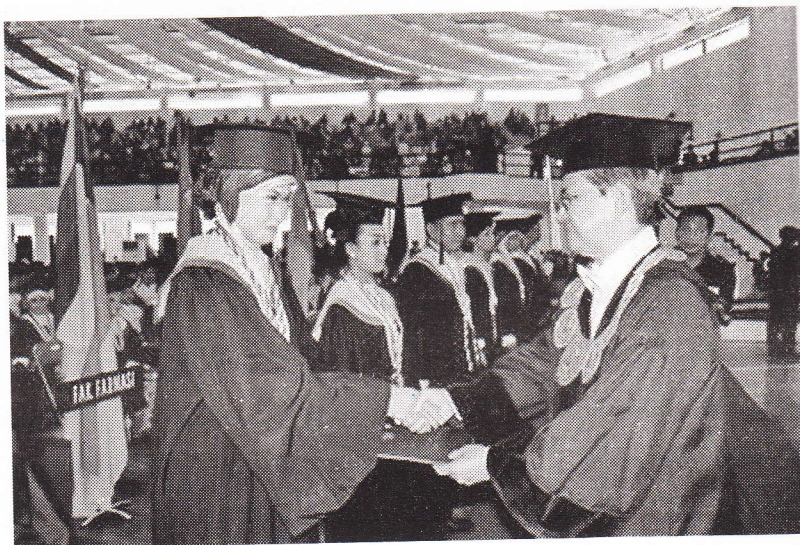
rekulturisasi, dan refigurisasi. Restrukturisasi adalah proses pelebagaan keyakinan, nilai dan norma baru tentang tugas dan fungsi dasar, struktur organisasi, kewenangan, dan tanggung-jawab, sesuai dengan tuntutan desentralisasi pendidikan. Rekulturisasi adalah pembudayaan perilaku seseorang/kelompok terhadap keyakinan, nilai dan norma baru yang dituntut oleh desentralisasi pendidikan. Sedangkan refigurisasi merupakan proses penataan kembali figur (pelaku) pendidikan agar memperoleh *the right person in the right place* sesuai dengan tuntutan desentralisasi pendidikan.

Dengan ditetapkan dan diberlakukan disentralisasi maka pihak sekolah harus berani membuat visi dan misi yang unggul. Rencana strategis harus dibangun. Evaluasi rencana strategis juga harus diberlakukan. Faktor yang perlu dievaluasi agar program studi dapat bermutu, diterima masyarakat dan mampu menjawab permasalahan di lapangan, antara lain berikut.

1. Lembaga pendidikan harus mempunyai *visi* dan *misi* serta manajemen pengelolaan yang jelas, tepat, logis, sistematis, terencana, orientasi daya saing dan mampu diwujudkan sesuai dengan kebutuhan pasar. Artinya *visi* yang ditargetkan harus sesuai dengan kebutuhan dan melihat kondisi yang ada baik *stake holders* dan *stoke holders*, kemudian *misi* yang harus dijalankan sesuai target dan selalu dievaluasi sehingga sedemikian rupa *visi* dapat terlaksana dengan baik. Manajemen pengelolaan yang *accountable*, *transparan* dan *reliabel* merupakan kunci sukses program studi dilaksanakan.
2. Kegiatan lembaga pendidikan bekerja sama secara *proaktif* dari semua lapisan *civitas akademika*, tanpa memandang jurusan atau program studi yang ada. Kegiatan mahasiswa dan *edukatif profesional*, bekerja secara *kondusif*, *kreatif*, *inovatif*, *responsif* serta sinergi dari *civitas akademik* sebagai pendukung utama terlaksananya



kurikulum yang ideal. Kurikulum lembaga tersebut difokuskan pada orientasi pusat unggulan, baik menanamkan materi kewirausahaan dan ketrampilan keahlian. Setelah lulus mahasiswa mempunyai bekal yang dapat diaplikasikan dalam dunia kerja.



Tamatnya pendidikan merupakan tuntutan bagi kita untuk dapat menerapkan Ilmu yang dipelajari dalam masyarakat.

Sumber: <http://www.unair.ac>.

3. Lembaga pendidikan harus mengevaluasi kurikulum yang ada, agar kurikulum yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan

pasar. Mata kuliah atau muatan pelajaran dirancang secara optimal dan tepat guna (*aplikatif*), sehingga ketajaman kurikulum dapat berorientasi mencari kerja, atau berkarya secara mandiri. Kurikulum yang optimal akan tercipta keluaran yang dapat diterima pasar (*Sales Labor Market Oriented*) dan berimplikasi mempercepat lulusan dalam meningkatkan mutu lulusan, sehingga dapat memperpendek waktu kuliah atau waktu belajar mereka.

4. Lembaga pendidikan berusaha bertanggung jawabkan keluaran yang dihasilkan dengan memberikan bekal dan *orientasi kerja* bagi lulusannya. Pusat unggulan, program studi dan strategi *positioning* yang kuat membuat lembaga pendidikan dapat dipertanggungjawabkan. Kemampuan bahasa asing dan komputersasi, salah satu hal pokok sebagai pedoman salah satu teknologi mutakhir dalam hubungan masyarakat global.

5. Lembaga pendidikan memberikan *fasilitas* yang relevan seperti laboratorium, perpustakaan, pusat studi, dan lain lain. Guna mencapai *visi* yang ditargetkan. Dengan demikian keluaran dari lembaga pendidikan mempunyai daya jual yang tinggi, yang diterima oleh pasar.
6. Lembaga pendidikan mempunyai strategi daya tarik tersendiri. Hal ini mempunyai arti setiap lembaga pendidikan atau lembaga pendidikan berusaha menghasilkan keluaran yang bagus, harus memiliki daya tarik yang disenangi oleh konsumen, baik itu fasilitas, keilmuan, program studi dan keistimewaan yang lain.
7. Peran pemerintah dalam memberikan keleluasaan pada lembaga dalam merancang kurikulum sehingga materi dapat relevan.
8. Peran masyarakat dan dunia informasi baik media cetak dan media elektronik untuk memberikan andil dalam pemasaran oleh lembaga pendidikan.

9. Meningkatkan daya kreatifitas mahasiswa menjadi seorang *kreator, inovator*, pemimpin dan manajerial yang bagus dengan pelatihan-pelatihan, pusat studi dan praktek lapangan.

Lembaga pendidikan kedepannya tetap eksis, mendapat *image* positif dan mempunyai *kans* yang cukup besar jika lulusannya banyak terserap di dunia kerja. Langkah proaktif sebagai aktifitas dini dalam menyikapi perubahan yang cukup mendasar tersebut, merupakan tindakan antisipasi, reaksi responsif dan sensitif dari konsekuensi evolusi proses kemajuan pendidikan. Karena itu strategi yang direncanakan ini akan menjadi jalan perintis dalam mencapai tujuan, bukan *by accident* tetapi *by plan*.

*By plan* yang matang serta penciptaan program studi dalam bidang perencanaan, pengendalian dan manajerial maka lembaga pendidikan harus menciptakan lulusan yang kompetitif dan relevan di pasar kerja.

Banyaknya pengangguran atau rendahnya lulusan yang tidak terserap di dunia kerja dan

dunia industri inilah yang diangkat dalam tulisan ini yang meliputi.

- 1) Faktor apa saja yang menyebabkan lulusan masih banyak menganggur,
- 2) Bagaimana perencanaan strategi kedepan dengan langkah dan ide-ide sebagai solusi perbaikannya.

Manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno *menagement*, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur serta merencanakan tindakan strategi. Karenanya, manajemen dapat diartikan sebagai ilmu dan seni tentang upaya untuk memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Maka Manajemen Strategi sebagai ilmu, seni, dan profesi (Konzl, 1993) dalam Suranto (2009).

Ilmu manajemen merupakan suatu kumpulan pengetahuan yang disistemisasi, dikumpulkan dan diterima kebenarannya. Hal ini dibuktikan dengan adanya metode ilmiah yang dapat digunakan dalam setiap penyelesaian

masalah dalam manajemen. Metode ilmiah pada hakikatnya meliputi urutan kegiatan, mengetahui adanya persoalan, mendefinisikan persoalan, mengumpulkan fakta, data dan informasi, menyusun alternatif penyelesaian, mengambil keputusan dengan memilih salah satu alternatif penyelesaian dan melaksanakan keputusan serta tindak lanjut.

Tujuan perencanaan strategi ini adalah strategi yang diterapkan agar lembaga pendidikan agar tetap eksis, sehingga program studi di lembaga pendidikan swasta tetap diminati di pasaran dan keluaran yang dihasilkan mampu bersaing.

---

## Bab 3

# Perjalanan Kurikulum

## A. Kurikulum Nasional

Menurut Depdiknas (2003) model kurikulum yang dirancang memiliki jenis yaitu Kurikulum SD-SMP satu atap, model kurikulum SMP terbuka, model program pengembangan diri, model kurikulum TK-SD satu atap, model kurikulum sekolah bertaraf internasional, kurikulum sekolah kategori mandiri, model integrasi kurikulum kesetaraan gender, model kurikulum penerapan pendidikan multikultur, model integrasi kurikulum pendidikan kecakapan hidup, model KTSP PAUD formal, model KTSP PAUD non-formal dan model kurikulum paket A dan B.

Kurikulum memiliki sejarah penting dalam perkembangannya. R. Bambang A. Soekisno (2007) dalam makalahnya berjudul, “Bagaimana Perjalanan Kurikulum Nasional (Pendidikan Dasar dan Menengah).” Menjelaskan bahwa sejak tahun 1945, kurikulum pendidikan nasional telah mengalami perubahan, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, dan tahun 2004 (S Cipto A. dalam <http://kesadaransejarah.blogspot.com>).

## 1. Kurikulum 1968 dan sebelumnya

Awalnya pada tahun 1947, kurikulum saat itu diberi nama *Rentjana Pelajaran 1947*. Pada saat itu, kurikulum pendidikan di Indonesia masih dipengaruhi sistem pendidikan kolonial Belanda dan Jepang, sehingga hanya meneruskan yang pernah digunakan sebelumnya. *Rentjana Pelajaran 1947* boleh dikatakan sebagai pengganti sistem pendidikan kolonial Belanda.

Setelah *Rentjana Pelajaran 1947*, pada tahun 1952 kurikulum di Indonesia mengalami penyempurnaan. Pada tahun 1952 ini diberi



nama *Rentjana Pelajaran Terurai 1952*. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional.

Kurikulum 1968 merupakan pembaharuan dari kurikulum 1964, yaitu dilakukannya perubahan struktur kurikulum pendidikan dari pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum 1968 merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

Dari segi tujuan pendidikan, kurikulum 1968 bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama.

## 2. Kurikulum 1975

Kurikulum 1975 hingga menjelang tahun 1983 dianggap sudah tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan masyarakat dan tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahkan sidang

umum MPR 1983 yang produknya tertuang dalam GBHN 1983 menyiratkan keputusan politik yang menghendaki perubahan kurikulum dari kurikulum 1975 ke kurikulum 1984. Oleh karena itu, pada tahun 1984 pemerintah menetapkan pergantian kurikulum 1975 oleh kurikulum 1984.

### **3. Kurikulum 1984**

Secara umum dasar perubahan kurikulum 1975 ke kurikulum 1984 di antaranya dengan Pendekatan pengajarannya berpusat pada anak didik melalui Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA). CBSA merupakan pendekatan pengajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk aktif terlibat secara fisik, mental, intelektual, dan emosional dengan harapan siswa memperoleh pengalaman belajar secara maksimal, baik dalam ranah kognitif, afektif, maupun psikomotor.

### **4. Kurikulum 1994**

Pada kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 1984, proses pembelajaran menekankan pada

pola pengajaran yang berorientasi pada teori belajar mengajar dengan kurang memperhatikan muatan (isi) pelajaran. Hal ini terjadi karena berkesesuaian suasana pendidikan di LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan) pun lebih mengutamakan teori tentang proses belajar mengajar. Akibatnya, pada saat itu dibentuklah Tim *Basic Science* yang salah satu tugasnya ikut mengembangkan kurikulum di sekolah.

## 5. Kurikulum Berbasis Kompetensi-Versi Tahun 2002 dan 2004

Kurikulum yang dikembangkan saat ini diberi nama *Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Pendidikan berbasis kompetensi menitikberatkan pada pengembangan kemampuan untuk melakukan (kompetensi) tugas-tugas tertentu sesuai dengan standar *performance* yang telah ditetapkan. *Competency Based Education is education geared toward preparing individuals to perform identified competencies* (Scharg dalam Hamalik, 2000) dalam

(R.Bambang A. Soekisno (2007). Hal ini mengandung arti bahwa pendidikan mengacu pada upaya penyiapan individu yang mampu melakukan perangkat kompetensi yang telah ditentukan. Implikasinya adalah perlu dikembangkan suatu kurikulum berbasis kompetensi sebagai pedoman pembelajaran.

## **6. Kurikulum Berbasis Kompetensi-Versi KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan)**

Pemerataan kesempatan pendidikan diwujudkan dalam program wajib belajar 9 tahun. Peningkatan mutu pendidikan diarahkan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia seutuhnya melalui olahhati, olahpikir, olahraga dan olahraga agar memiliki daya saing dalam menghadapi tantangan global. Peningkatan efisiensi manajemen pendidikan dilakukan melalui penerapan manajemen berbasis sekolah dan pembaharuan pengelolaan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) lebih kepada mengimplementasikan regulasi yang ada, yaitu PP No. 19/2005. Akan tetapi, esensi isi dan arah pengembangan pembelajaran tetap masih bercirikan tercapainya paket-paket kompetensi

”Janganlah kamu sekalian memperbanyak bicara selain berzikir kepada Allah, sesungguhnya memperbanyak perkataan tanpa zikir kepada Allah akan mengeraskan hari, dan sejauh-jauh manusia adalah yang hatinya keras.” (HR. Tirmizi)

## B. Merancang Kurikulum Lokal

Pendidikan yang kita kelola sebaiknya pendidikan yang memberikan bekal pembaharuan bidang kecakapan hidup, walaupun hal ini sesuai ruh dan tujuan pendidikan sekolah dasar dan menengah tidak ke

*vokasional*, tetapi pendidikan *Broad Based Education* juga membekali konsep kecakapan hidup yang menyiapkan lulusannya mampu berdiri sendiri, berwirausaha, dan mampu mencukupi kebutuhan sendiri dari bekal ilmu yang ia peroleh.

### 1. Konsep Pendidikan Berorientasi Tenaga Kerja

Kondisi bangsa yang ekonominya sedang terpuruk seperti sekarang ini, kurikulum yang di rancang harus memuat kecakapan hidup, yaitu konsep pendidikan berorientasi tenaga kerja, sehingga kurikulum yang di persiapkan adalah lulusan yang siap pakai, siap jual, siap guna dan mandiri. Langkah yang ditempuh dengan pendidikan berbasis *life skill*.

Pendidikan berbasis kecakapan hidup adalah pendidikan yang membekali kecakapan yang dimiliki oleh peserta didik untuk mau dan berani meghadapi problema hidup dan kehidupan secara wajar tanpa merasa tertekan, kemudian secara proaktif, kreatif dan inovatif

mencari, menemukan solusi sehingga mampu mengatasi permasalahannya.

Konsep kurikulum kecakapan hidup (*life skill*) lebih luas dari keterampilan untuk bekerja, tidak hanya sekedar keterampilan manual. Menurut Kaluge (2002), (Slamet, 2005). Kecakapan hidup dapat dipilah menjadi lima, yaitu "kecakapan mengenal diri (*self awarness*), yang juga sering disebut kemampuan personal (*personal skill*), kecakapan berpikir rasional (*thinking skill*), kecakapan sosial (*social skill*), kecakapan akademik (*academic skill*), dan kecakapan vokasional (*vocational skill*).

Selain kecakapan hidup yang diberikan, maka seorang peserta didik juga di gali kemampuan dan potensi kecerdasannya dari delapan macam kecerdasan (Gardner, 1993), yaitu "kecerdasan yang telah dikenal dengan " *Linguistic intelligence, Logical-mathematical intelligence, Spatial intelligence, Bodily-Kinesthetic intelligence, Musical intelligence, Interpersonal intelligence, Intrapersonal intelligence, Naturalist intelligence.*

## 2. Broad Based Education dan Focused Based Education

*Broad based Education* merupakan pendidikan dengan strategi pembelajaran yang mendasar dan berbasis luas tapi terfokus, artinya pengembangan ilmu dan strategi pembelajarannya difokuskan dalam bidang yang sesuai dengan kebutuhan pasar, teknologi dan keilmuan.

Keilmuan yang mendasar dan fokus mengajarkan sesuatu itu kuat, fokus dan benar-benar menjadikan ia pakar, bukan setengah-setengah. Jadi bisa saja, ada model percepatan atau akselerasi, sehingga pelajaran yang kurang perlu menempuh mata kuliah yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan ilmu dasar, jika hal itu memperhambat waktu lulus dan menyebabkan rendahnya kompetensi lulusan.

Hal ini dirasa akan menambah beban dan menghabiskan waktu proses belajar yang terfokus pada teori. Gimana jika digantikan dengan praktik dan ilmu yang lebih relevan



sesuai tuntutan pasar, maka pendekatan *Contextual Teaching and Learning* dirasa sangat tepat.

Sekolah Dasar dan Menengah juga akan bisa lebih baik, jika menggunakan *focused based*. Karena hakekat pendidikan menengah adalah menghasilkan keluaran siap pakai, siap kerja, artinya setiap lulusan yang di hasilkan lembaga pendidikan dapat terserap dan mampu diterima di pasar kerja, paling tidak ia bisa mandiri dengan ilmu yang ia peroleh. Tetapi pendidikan dasar dan menengah (wajib belajar sembilan tahun) bisa menggunakan *Broad Based Education*.

Kenapa begitu? Hal ini juga di rasakan bahwa lulusan SMU hampir tidak laku lagi di pasar kerja, kecuali sebagai tenaga kasar atau buruh. Bahkan tak sedikit lembaga pendidikan D3 atau S1 yang menjual ijazah semata, yang didukung minimnya teori. Apakah hal ini dirasa akan mengembangkan ilmu pengetahuan? Saya rasa bukan ilmu pengetahuan, tetapi pembohongan publik dan pelacuran pendidikan.

Maka program studi mengacu pada paradigma baru sistem pendidikan bermutu, yaitu sistem peningkatan *life skill*, *potensi diri*, *minat dan bakat* dengan mengakomodasi kebutuhan masyarakat dan kurikulum global (Suranto, 2006).

*“Masyarakat industri dan usaha selalu mengeluh apabila mutu lulusan lembaga pendidikan tidak sesuai dengan kebutuhan mereka, tetapi tidak ada kontribusinya karena menganggap tersebut bukan urusan mereka, apakah kurikulum yang di rancang memang tidak sesuai kebutuhan pasar.”*

### **C. Merancang Kurikulum Lokal Berstandar Nasional**

Kurikulum lokal perlu kita rancang agar dapat berstandar nasional? Karena banyak faktor yang harus kita perhatikan, faktor itu antara lain berikut.

1. Faktor heterogenitas tingkat pendidikan masyarakat, keterpurukan perekonomian masyarakat, kurang meratanya tingkat pendidikan, rendahnya mutu lulusan dan banyaknya pengangguran intelektual, serta pembelajaran yang tidak tepat merupakan tantangan pendidikan yang berakibat pada pola pikir masyarakat.



Setiap adanya bursa kerja selalu diserbu oleh banyaknya pelamar. Hal ini menandakan tingginya angka pengangguran di Indonesia.

**Sumber:** <http://www.mediaindonesia.com>

Pengangguran di Indonesia 70%, di dominasi oleh kaum muda. Sekalipun lulusan diploma dan sarjana persentasinya rendah tetapi hal ini perlu disiasati dan diantisipasi secara dini dengan pembelajaran yang baik dan accountable, maka butuh pemikiran semua pihak. Hal ini bisa di tunjukkan tabel-1 sampai tabel-3.

**Tabel.1 Penganggur terbuka menurut kategori pengangguran**

Kategori Pengangguran	Laki-laki ribuan	Perempuan ribun	Jumlah ribuan
Mencari pekerjaan	3,171	2,452	5,623
Mempersiapkan usaha	49	65	114
Merasa tidak mungkin mendapat kerjaan	1,417	1,665	3,082
Sudah kerja tapi belum mulai kerja	291,0	421,0	712,0
Jumlah	4,928	4,603	9,531

Sumber : Sakernas, DPR 2003 (Usman, 2004)

**Tabel.2 Pengangguran di Indonesia secara makro menurut pendidikan**

Kategori Pengangguran	Laki-laki ribuan	Perempuan ribuan	Jumlah ribuan
SD	9,847	10,240	20,087
SLTP	2,809	1,951	4,761
SLTA	1,687	1,016	2,703
Diploma/Akademi	197	217	413
Universitas	272	232	504
Jumlah	14,812	13,655	28,467

Sumber : Sakernas, DPR 2003 (Usman, 2004)

**Tabel. 3 Total pengangguran di Indonesia**

No.	Tahun	Penduduk	Pengangguran
1.	1999	179 jiwa	5,37 jiwa
2.	2005	223 jiwa	11,15 jiwa
3.	2020	254 jiwa	20.3 jiwa

Sumber : Sakernas, DPR 2003 (Usman, 2004)

2. Kurikulum harus berwawasan global karena kita harus membekali siswa dengan praktik. Di kampus atau sekolah dilaksanakan teori dan praktik dasar sebaiknya sebesar 40% teori, dan 60% dilaksanakan di kehidupan nyata, yaitu keterampilan dan pengalaman nyata atau riil bahkan kalau perlu produktif yang diperoleh melalui prinsip *learning by doing*.

Pendidikan yang dilakukan melalui proses pengalaman akan memberikan pengetahuan keterampilan dan nilai-nilai dunia kerja yang tidak mungkin atau sulit didapat di sekolah, yaitu pembentukan karakter, disiplin, keunggulan, wawasan pasar, wawasan nilai tambah, dan pembentukan etos kerja. Maka perlu kurikulum dan asesmen pembelajaran yang dibuat adalah perancangan kurikulum berbasis industri (*income generating*), kurikulum teori 40% dan praktek 60%.

3. Materi yang tercantum pada kurikulum haruslah peduli terhadap kompetensi atau kemampuan yang harus dicapai oleh siswa,

- dirubah ke model pengajaran berbasis kompetensi agar mempercepat kelulusan dan daya pemahaman, mengetahui kemampuan masing-masing peserta didik. Sehingga siswa yang dihasilkan sesuai standar perusahaan dan standar sekolah.
4. Kurikulum yang dirancang memungkinkan siswa yang telah memiliki sejumlah satuan kemampuan tertentu (karena program pengajarannya berbasis kompetensi), perlu dihargai dan perlu percepatan hal ini dimaksudkan untuk.
- a) Membekali siswa agar mata pelajaran yang diterima oleh siswa dapat terfokus dan dapat digunakan untuk menciptakan kerja sendiri.
  - b) Mengembangkan kedisiplinan siswa
  - c) Menciptakan *character building*
  - d) Mempermudah siswa untuk mendapatkan pekerjaan.
  - e) Menciptakan lulusan yang dihasilkan sesuai standar sekolah dan standar kebutuhan dunia kerja.

- f) Meningkatkan dan menciptakan keunggulan, sekaligus bekal beradaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Kurikulum lokal menjadi daya tarik dan ciri khas bagi lembaga pendidikan yang menyelenggarakan kegiatannya. Sehingga sekolah yang memiliki ciri tersendiri itu kadang akan terkenal dan menjadi pilihan banyak konsumen.



# Daftar Pustaka



- Al-Qur'an dan Terjemahnya. 1989. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Abu-Duhou, I., 2002. *School Based Management*, Jakarta: Logos.
- Anonim, 2003. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- Ausubel, D.P. 1978. *Educational Psychology: A Cognitive View*, New York: Werblw & Peck.
- Becher, T. & Maclure, S. 1978. *The politics of curriculum change*. London: Hutchinson & Co.
- Bell-Gredler, M.E. 1986. *Learning and Instruction: Theory into practice*. New York: Macmillan Publishing Co.
- Bernard, H.W. 1965. *Psychology of Learning and Teaching*. New York: Mc Graw-Hill Book Co.
- Bettencourt, A, 1989. *What is Constructivism and Why Are They All Talking about It?*, Michign State University.

- Bloom, B.S., Hasting, J.T. & Madaus, G.F. 1971. *Handbook of formative and summative evaluation of student learning*. New York: McGraw-Hill.
- Bobbit, F. 1918. *The curriculum*. Boston: Houghton Mifflin.
- Brady, L. 1990. *Curriculum Development*. New York: Prentice Hall.
- Brandt, R. 1978. *On Evaluation: An Interview with Daniel Stuf flebeam*. Educational Leadership (January 1978), 35 (4): 248-254.
- Conference on Testing Problems*. Princeton, NJ: Educational Testing Service. Page 55.
- Crow and Crow. *Pengantar Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 1990, edisi III.
- Cunningham, W. F. 1981. *The Pivotal Problems of Education*. New York: The MacMillan Co.
- Sudirwo, Daeng. 2002. *Otonomi Perguruan Tinggi Hubungannya dengan Otonomi Daerah*. Manajerial. Vol.01. No1:72-79.
- De Porter, B. 1992. *Quantum Learning*, Bandung: Kaifa.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1993. *Link and Match*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1997. *Himpunan Perundang-undangan Republik Indonesia*. Jakarta.
- Depdiknas. 2003. *Standar Kompetensi Bahan Kajian; Pelayanan Profesional Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Jakarta: Puskur Balitbang.
- Diknas. *Pengembangan Model Mata Pelajaran Muatan Lokal. Sosialisasi KTSP*. Diknas. @[http://www.ktsp.diknas.go.id/download/ktsp\\_sma/12.ppt](http://www.ktsp.diknas.go.id/download/ktsp_sma/12.ppt)
- Dimiyati, H. M. 2000. *Akulturasi teknologi pendidikan dalam masyarakat Indonesia transisional*. Malang: CV. Wineka Media.
- Satori, Djam'an. 2005. Makalah *Implementasi Life Skills Dalam Konteks Pendidikan Di Sekolah*.
- Djojonegoro, Wardiman. 2003. *Pengembangan sumber daya manusia melalui sekolah menengah kejuruan*. Jakarta.
- Dolaim, Adriyani. 2004. *Pengangguran di Indonesia, Tugas Mata Kuliah Pendidikan Ketenagakerjaan*. PPs Doktor UNY. Yogyakarta.
- Efendi, M. dkk. 2005. *Pengantar Arah Pengembangan Kurikulum Dan Pengajaran*. Malang: Laboratorium

Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan  
UNM.

Gaffar, A. 1999. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.

Gie, T. L. 1977. *Suatu Konsepsi ke Arah Penertiban Bidang Filsafat*. Jogjarkarta: Karya Kencana

Gie, T. L. 1999. *Pengantar Filsafat Ilmu*. Jogjakarta: Liberty.

Glatthorn, Allan A. (1987). *Curriculum leadership*. Glenview, IL: Scott, Foresman and Co.

Guba, E.C. & Lincoln, Y. 1981. *Effective evaluation*. San Fran cisco, CA: Jossey Bass.

Hadi, P. H. 1994. *Epistemologi: Filsafat Pengetahuan*. Jogjakarta: Kanisius.

Hasan, S.H. 1988. *Evaluasi Kurikulum*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Hunt, B. 1978. *Who and what to be evaluated? Educational Lead ership* (January 1978), 35 (4): 261.

Jalal, Fasli. 2004. *Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan*, Depdiknas Jakarta.

- Jasin, Anwar. 1987. *Pembaharuan kurikulum sekolah dasar: Sejak proklamasi kemerdekaan*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Johnson, E. B., 2002. *Contextual Teaching and Learning*, Thousand Oaks: Corwin Press, Inc.
- Kleden, I. 1987. *Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan*. Jakarta: LP3ES.
- Komariah, A. dan Triatna, C., 2005. *Visionary Leadership*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Mc. Neil, John, 1988. *Kuikulum: Sebuah Pengantar Komprehensif* (terj. Subandi), Jakarta: Wirasari.
- Miller and Seller, 1985. *Curriculum perspectives and practice*. New York: Longman.
- Mulder, N (1999) *Agama, Hidup Sehari-hari dan Perubahan Budaya*. Jakarta: Gramedia.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 1997. *Pengembangan Kurikulum; Teori dan Praktek*. Bandung: P.T. Remaja Rosdakarya.
- Nasution, S. 1991. *Pengembangan Kurikulum Pendidikan*, Bandung: Citra Adirya Bakti.
- Permendiknas No. 22, 23 dan 24 Tahun 2007.
- Razak, A. dan Rais, Latief. 1984. *Terjemahan Hadits Shohih*. Jakarta: Pustaka Al-Husna.

- Slamet, P.H. 1993. "*Kontribusi Dunia Usaha Terhadap Pendidikan Menengah Kejuruan Dalam Upaya Mempersiapkan Tamatan yang Berkualitas*". Makalah Disajikan dalam Seminar Pendidikan, IKIP YP. Klaten 17 November 1993.
- Slamet, P.H. 1998. *Disentraliasasi Pendidikan*. Jurnal Pendidikan. Jakarta.
- Slamet, PH. 2005. *Makalah Pendidikan Kecakapan Hidup: Konsep Dasar*.
- Slameto. 1991. *Proses Belajar Mengajar Dalam Sistem Kredit*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Stake, R.E. 1967. *The countenance of educational evaluation*. *Teachers College Record*. 68 (7): 523-540.
- Subandijah, 1993. *Pengembangan dan Inovasi Kurikulum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sudibyoy, Bambang. 2005. *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Mutu dan Kualitas Manusia di Indonesia*. Makalah Seminar. FORTIS. Jakarta.
- Sugiharto, I. B. (1996) *Postmodernisme*. Jogjakarta: Kanisius.
- Sugiyono, 2005. *Meningkatkan Peran Pendidikan kejuruan di Era Global*. Makalah Prisiding Seminar Nasional PTK-UNY. Yogyakarta.

- Sulaksana, U., 2004. *Manajemen Perubahan*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar.
- Sunaryo. 1996. "Tanggapan Dunia Usaha Terhadap Program Link and Match". *Jurnal Kependidikan*. 26 (1): 25-36.
- Suranto, 2002. *Peningkatan Mutu Pendidikan di Jurusan Teknik Industri UMS dengan Penerapan Quality Control Circle*. *Jurnal Ilmiah Teknik Industri UMS*. Volume. Desember 2002.
- Suranto. 2005. *Menyongsong Reformasi Pendidikan Vokasi di Indonesia. Makalah filosofis tentang Pendidikan Vokasi*. Mahasiswa pps s3. Uny. Yogyakarta.
- Suranto. 2009. *Menggagas Kurikulum Lokal Berwawasan Global*, Makalah Perbaikan dan Perubahan Kurikulum. Diskusi Para Dosen LPTK. Yogyakarta.
- Suriasumantri, J. S. 1999. *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Suseno, F.M. 1992. *Filsafat sebagai ilmu kritis*. Jogjakarta: Kanisius.

- Suyono, Haryono. 2003. *Membangun mutu modal manusia indonesia menghadapi era global.*
- Tampubolon, mangatas. 2004. *paradigma baru pendidikan bermutu berdasarkan sistem high based education menghadapi tantangan abad ke-21 di indonesia.* Makalah seminar pendidikan di fip-unimed medan.
- Taylor, Philip H. 1968. *The contribution of psychology to the study of the curriculum.*
- Tim Pengembang MKDK Kurikulum dan Pembelajaran. 2002. *Kurikulum dan Pembelajaran.* Bandung: Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan UPI.
- Tyler, R.W. 1950. *Basic principles of curriculum and instruction.* Chicago: University of Chicago Press.
- Usman, marzuki. 2004. *Kualitas sumber daya manusia dan perluasan kesempatan kerja.* Makalah. Majalah nakertrans edisi-03 th.xxiv-juni 2004.
- Uyoh, Sadulloh. 1994. *Pengantar Filsafat Pendidikan.* Bandung: P.T. Media Iptek.
- W. Tyler, Robert M. Gagne, & Michael Scriven (Eds.). *Perspectives of curriculum evaluation.* Chicago: Rand McNally & Co.



van Peursen, C. A. 1976. *Strategi Kebudayaan*.  
diindonesiakan oleh Dick Hartoko. Jogjakarta:  
Kanisius.

Zais, R.S. 1976. *Curriculum: Principles and foundation*.  
New York: Thomas Y. Crowell.

<http://www.depdiknas.go.id/content.php>

Bambang, R. A. Soekisno. 2007. *Bagaimanakah  
Perjalanan Kurikulum Nasional* (pada Pendidikan  
Dasar dan Menengah. Makalah 16 Mei ,  
disebarluaskan juga oleh S CiptoA dengan alamat  
<http://kesadaransejarah.blogspot.com> dan <http://www.e-smartschool.com>, serta oleh <http://alumni-xaverius.zai.web.id>

<http://rbaryans.wordpress.com>

<http://www.puskur.net/index.php>

Buku ini telah dinilai oleh Balai Bahasa Jawa Tengah dan telah ditetapkan memenuhi kelayakan berdasarkan Keputusan Kepala Balai Bahasa Jawa Tengah No. 2657/A10.8/H.5/2010 Tanggal 22 Oktober 2010 tentang Penetapan Buku Pengayaan, Buku Referensi, dan Buku Panduan Pendidikan sebagai Buku Nonteks Pelajaran yang Memenuhi Syarat Kelayakan untuk Digunakan sebagai Sumber Belajar pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.



## **KONSEP PENGEMBANGAN KURIKULUM MEMBANGUN SEKOLAH GLOBAL**

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam pembangunan suatu bangsa. Untuk menyesuaikan kebutuhan dan tuntutan zaman, maka setiap bangsa akan meningkatkan mutu pendidikan agar memiliki daya saing. Hal ini dapat kita lihat di negara kita sering bergonta-ganti kurikulum. Semua ini dilakukan untuk meningkatkan mutu dan lulusan yang berkualitas agar dapat bersaing di dunia global. Tentunya penerapan kurikulum juga harus dapat memperhatikan keadaan di daerah.

Melalui buku **Konsep Pengembangan Kurikulum Membangun Sekolah Global** ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pembaca khususnya bagi mereka yang berkecimpung dalam dunia pendidikan. Untuk dapat meratakan program dan strategi pembelajaran yang lebih baik.

**PT. SINDUR PRESS**

Jl. Pleburan VIII/64 Semarang  
Telp. (024) 6580335 - 6582901  
Fax. (024) 6582903 - 6581440

ISBN 978-979-067-033-4



3 174 11 245 1